

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2025

LKjIP

Dinas Perhubungan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	10
C. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	65
A. Pengukuran Kinerja	65
B. Analisis Capaian Kinerja	81
C. Realisasi Keuangan.....	105
BAB IV P E N U T U P.....	109

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, LKjIP ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, yang meliputi pencapaian sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

^

Drs. SUARDI, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan berorientasi pada hasil. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi penyelenggaraan transportasi darat dan laut, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, pengelolaan lalu lintas dan angkutan, serta peningkatan keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan berpedoman pada dokumen perencanaan strategis yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat dan barang, serta peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi, khususnya dalam karakteristik wilayah kepulauan yang memerlukan sistem transportasi yang andal, aman, dan terintegrasi antarwilayah. Ketersediaan sarana

dan prasarana transportasi yang memadai, baik transportasi darat maupun transportasi laut antar pulau, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai media untuk menyampaikan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026. LKjIP ini juga merupakan sarana evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan terukur mengenai capaian kinerja organisasi, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola program dan kegiatan serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan

Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

Selain itu, LKjIP dimaksudkan sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar secara transparan, terukur, dan akuntabel.
- 2) Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah kepada Bupati Kepulauan Selayar dan masyarakat.
- 4) Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
- 5) Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan

Selayar, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

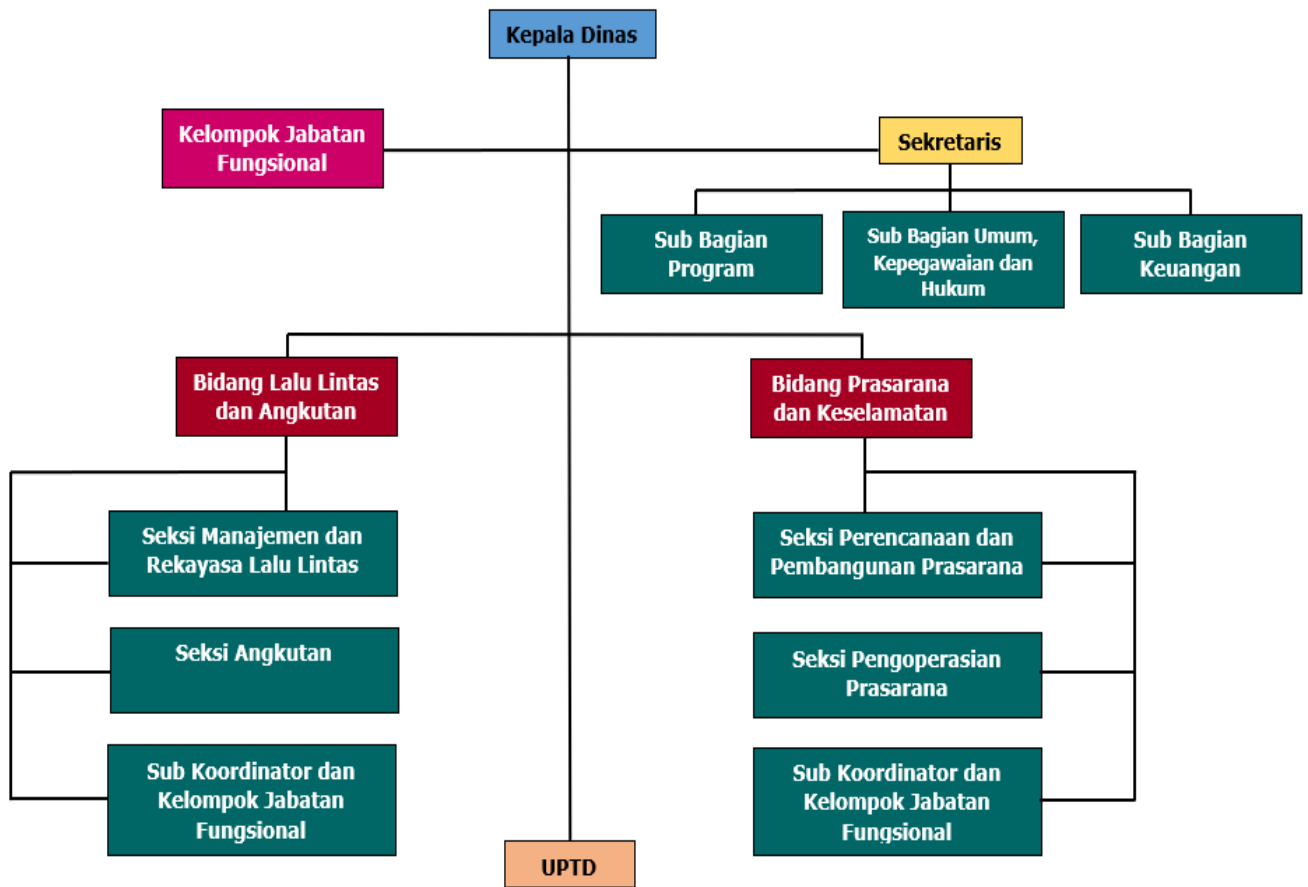
- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

- Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji

kelayakan kendaraannya.

- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
- c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
- d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
- e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
- f. Peremajaan angkutan desa;
- g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
- h. Pengadaan sistem informasi transportasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi IV	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, Keselamatan, dan Ketertiban bagi Pengguna Jalan	Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Pelabuhan, Jangkauan Hub-hub melalui Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Perhubungan dan Transportasi
			Peningkatan Infrastruktur Kepelabuhanan
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
Pembangunan Simpul-simpul Transportasi			
Misi I	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Perangkat Daerah sesuai SAP	
		Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi Informasi yang Baik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan

Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan KAwasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Perhubungan dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan dari segi transportasi menjadi sangat penting antara lain :

1. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pemindahan barang dari pemasok ke konsumen juga dilakukan dengan cepat oleh transportasi, proses pendistribusian barang dari pemasok ke konsumen tersebar luas secara lintas ruang dan waktu. Aliran barang dari distributor ke konsumen sangat mempengaruhi besarnya biaya logistik. Dinas Perhubungan memiliki peranan dalam aktivitas transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti pembukaan rute/trayek angkutan darat menuju kawasan PDL, pembangunan shuttle halte dalam kawasan PDL dan pengadaan lampu jalan dalam kawasan PDL yang dimasukkan dalam Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan aksesibilitas transportasi pada spot-spot destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah konektivitas daerah satu dengan lainnya terutama pulau-pulau yang memiliki obyek wisata unggulan. Program Dinas Perhubungan dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata antara lain pembangunan tambatan perahu, penerangan LPJU dalam kawasan wisata, dan mendukung untuk memfasilitasi penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter guna menunjang investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar yang cukup besar.
3. Dari segi dukungan terhadap Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), Dinas Perhubungan memiliki peran dalam pendukung sub-

sub sentra KIPT dengan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (LPJU).

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Dinas Perhubungan dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam pembangunan tambatan perahu dan pengadaan LPJU di desa-desa guna mendukung perekonomian perdesaan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan “kepulauan” yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah tersebut serta menjamin pemerataan maupun perpindahan barang maupun penduduk, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mendukung PDL, KEK, KIPT, dan Gerbang Sari Dinas Perhubungan berperan dalam membangun dan meningkatkan akses ke kawasan tersebut. Pengembangan bidang perhubungan dengan adanya perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya wilayah kepulauan serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah perjalanan masyarakat termasuk perjalanan wisata, meningkatkan moda transportasi umum dan arus logistik barang, peningkatan PAD dan menjaga kestabilan harga barang dan disparitas harga. Adapun rencana pengembangan antara lain :

- a. Revitalisasi, rehabilitasi dan penambahan panjang tambatan perahu yang diprioritaskan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa untuk mendukung program Gerbang Sari;

- b. Pembangunan dermaga penyeberangan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana jalan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa wisata.

Normalisasi Tambatan Perahu di Daerah Pesisir

Melihat sarana dan prasarana untuk tambat labuh yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat kurang. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan, selain itu dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil menjadikan transportasi menjadi sangat penting. Dalam kondisi eksisting tambat labuh masih kurang efisien untuk berlabuhnya perahu nelayan di dermaga dan juga lalu lalang nelayan saat bongkar muat. Dengan adanya normalisasi tambatan perahu di daerah pesisir akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Dinas Perhubungan dalam hal normalisasi tambatan perahu difokuskan ke desa-desa wisata demi mendukung KEK Pariwisata, sub-sub sentra KIPT dan desa-desa untuk mendukung gerakan Gerbang Sari.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan sasaran strategis tersebut disusunlah suatu indikator kinerja, sehingga pencapaian atas kinerja sasaran dapat diukur setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/Bandara/Terminal per tahun	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/Bandara/Terminal per tahun	Kepala Dinas Perhubungan	Data Jumlah Orang yang melalui dermaga/Bandara/Terminal, Bandara dan Terminal
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang dibagi Jumlah Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dikali 100	Kepala Dinas Perhubungan	Data Kebutuhan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	Jumlah Pembangunan Fasilitas Transportasi pada tahun n	Kepala Dinas Perhubungan	Data Pembangunan Fasilitas Transportasi
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun n	Kepala Dinas Perhubungan	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Hasil Evaluasi SAKIP
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun n	Kepala Dinas Perhubungan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

C. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan		Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Terminal per tahun	311.173
		Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	51,41
		Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	3
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)
		Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00 (B)
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	86,00 (B)

Dalam pencapaiannya kinerja sasaran strategis ditunjang oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Sesuai Renstra

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,53	7.999.039.577
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	88	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	51.000.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7.500.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD (Dokumen)	1	4.375.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD (Dokumen)	1	4.375.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	10.000.000
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	5.080.824.142
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	5.054.474.142
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8.850.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	10.000.000
4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	7.500.000
3.	Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	38,89%	150.000.000
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	50.000.000
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	50.000.000
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	50.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	100%	740.323.035
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	3.850.000
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	70.000.000
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50	35.883.035
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	11.540.000
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	30.000.000
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	29.050.000
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	470.000.000
8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	55%	50.000.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	50.000.000
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.368.220.400
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	132.950.000
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.235.270.400
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	90	358.672.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	38.630.000
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	250.000.000
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	22.042.000
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	50.000.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,92	1.782.254.718
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Bidang LLAJ yang ditetapkan(dokumen)	100	55.000.000
1)	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	12	55.000.000
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten/ kota yang tersedia	2.217	932.000.000
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	25	432.000.000
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	250	500.000.000
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	66,67	90.000.000
1)	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Diawasi (Unit)	1	130.000.000
4.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	27,65	65.000.000
1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	65.000.000
5.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	51,50	375.000.000
1)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	125.000.000
2)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	120	450.000.000
6.	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui	100	25.454.718
1)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	1	25.454.718

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	70,50%	1.585.344.763
1.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	65	1.585.344.763
1)	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	6	1.285.000.000
2)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5	300.344.763
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	100%	5.248.102
1.	Kegiatan Penerbitan izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	100	5.248.102
1)	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	1	5.248.102
TOTAL				11,171,887,160

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun perjanjian kinerja dari tingkat eselon II sampai dengan tingkat eselon III, eselon IV, Staf, dan Pejabat Fungsional, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Terminal per tahun	311.173
	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	51,41
	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	3
2.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (BB)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00 (BB)
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	86,00 (BB)

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.290.996.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 1.145.000.000	DAU dan PAD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 3.320.000.000	DAU dan PAD
JUMLAH		Rp 10.755.996.000	

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Rp. 3.500.000	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.875.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.375.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 1.875.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.375.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
							Dokumen Perubahan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LkjIP Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan LKPJ Penyusunan LPPD	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.768.596.000	Dokumen	Terbayarkannya Gaji Pokok PNS dan Tunjangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.768.596.000	Dokumen	Terbayarkannya Gaji Pokok PNS dan Tunjangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan omponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Rp. 2.300.000	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
			Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 18.268.200	Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 8.000.000	Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 15.250.000	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.000.000	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 270.023.000	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Rp. 100.000.000	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 452.548.800	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Rp. 42.130.000	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
			Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 240.000.000	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp. 328.380.000	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp. 10.000.000	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Rp. 1.000.000.000	Unit	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rp. 25.000.000	Laporan	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Tambatan Perahu	Rp. 1.000.000.000	Unit	Terlaksananya Pembangunan Tambatan Perahu di 1 Titik Lokasi
2	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu	Rp. 700.000.000	Unit	Terlaksananya Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu di 3 Titik Lokasi
3	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Rp. 600.000.000	Dokumen	Terlaksananya Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 1 Dokumen
4	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS) dan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP)	Rp. 950.000.000	Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> Rencana Induk Pelabuhan (RIP) 2 Dokumen (FS) 2 Dokumen dan en
5	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 100.000.000	Unit LPJUTL/LPJUTS	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Rp. 3.500.000	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)			
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.875.000		
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp. 1.375.000		
				Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.875.000		
				Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.375.000		
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Penyusunan LkjIP Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan LKPJ Penyusunan LPPD	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Perjalanan Dinas SKPD	Rp 270.023.000	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.4.768.596.000	Dokumen	Terbayarkannya Gaji Pokok PNS dan Tunjangan
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Rp. 2.500.000	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
	Kabupaten/ Kota		Keuangan Akhir Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
3			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 2.500.000	Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 100.000.000	Laporan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 42.130.000	Laporan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 240.000.000	Laporan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 328.380.000	Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 10.000.000	Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 2.300.000	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 18.268.200	Paket	Tersedianya bahan Logistik Kantor
4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 8.000.000	Paket	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan
5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 15.250.000	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 8.000.000	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp. 10.000.000	Unit

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Survey Kepadatan Lalu Lintas Survey Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Penertiban dan pengaturan arus lalu lintas pada hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan Kajian Andalalin mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur kaitannya pada penerbitan rekomendasi Andalalin		Laporan	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas		Laporan	Terawasinya dan terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Survey Kepadatan Lalu Lintas		Laporan	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota
				Survey Moda Transportasi			
				Penertiban dan pengaturan arus lalu lintas pada hari-hari Besar			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
	Jalan (LLAJ)			Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan Pengawasan Pelayaran Rakyat (Pelra) terkait penerbitan Rekomendasi BBM jenis tertentu Koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan			

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tambatan Perahu		Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Tambatan Perahu
2	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tambatan Perahu		Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pembangunan Tambatan Perahu
3	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen Pengawasan Tambatan Perahu		Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengawasan Tambatan Perahu
4	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingk. Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS) dan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP)	Rp. 950.000.000	Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS) 2 Dokumen dan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) 2 Dokumen

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana		Laporan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 100.000.000	Unit LPJUTL/LPJUTS	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah		Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah
4	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemantauan / Pengawasan terhadap Pengoperasian Sarana / Prasarana Perhubungan		Laporan	Terlaksananya Pemantauan / Pengawasan terhadap Pengoperasian Sarana / Prasarana Perhubungan
5	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Rp. 600.000.000	Dokumen	Terlaksananya Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 1 Dokumen

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemantauan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor		Laporan	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor		Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
3	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengujian Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Tugas		Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD PENGELOLAAN FASILITASI PELAYANAN DARAT PELABUHAN PAMATATA DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 70.000.000	Dokumen	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan dan Pengawasan pelayanan Terminal dan Perparkiran	Rp. 20.000.000	Dokumen	Terawasinya Operasional Terminal Penumpang Tipe C

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD PELAUHAN LAUT LOKAL DINAS PERHUBUNGAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	MASUKAN (INPUT)	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Memantau dan Memeriksa Laporan Data Penumpang	-	Laporan	Terlaksananya Pemantauan dan Pemeriksaan Laporan Data Penumpang
2	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Memantau Pengelolaan Administrasi UPTD Pelabuhan Laut Lokal	-	Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi UPTD Pelabuhan Laut Lokal
3	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Mengawasi Arus Lalu Lintas dan Memantau Data Transportasi Kendaraan dan Golongannya	-	Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Arus Lalu Lintas dan Pemantauan Data Transportasi Kendaraan dan Golongannya

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat Dokumen layanan ketatausahaan	1 Membuat format daftar hadir harian														100%
		2 Membuat format rekapitulasi daftar hadir bulanan														
		3 Membuat daftar penerimaan TPP ASN														
2	Membuat laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengaturan Parkir oleh Petugas Juru Parkir	1 Membuat format laporan harian Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan														100%
		2 Membuat format laporan bulanan Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		3 Melakukan Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan														
3	Membuat laporan arus penumpang dan kendaraan angkutan yang tiba dan berangkat melalui terminal	1 Membuat rekapitulasi data angkutan dan penumpang harian yang datang dan berangkat melalui terminal														
		2 Membuat rekapitulasi data angkutan dan penumpang bulanan yang datang dan berangkat melalui terminal														
4	Membuat Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir dan Retribusi Masuk Terminal	1 Membuat laporan harian Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Parkir														
		2 Membuat laporan Rekapitulasi bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Parkir														
		3 Membuat laporan harian Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Masuk Terminal														
		4 Membuat laporan Rekapitulasi bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Masuk Terminal														

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Menyiapkan Daftar Hadir ASN dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														
		2 Memverifikasi Rekapitulasi Daftar Hadir														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		Bulanan ASN dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														
2	Pelaksanaan Administrasi Persuratan	1 Memeriksa Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar														100%
		2 Menindaklanjuti Surat Masuk														
		3 Memverifikasi Surat Keluar														
3	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Membuat Ampra TPP														100%
		2 Mengupload Surat Cuti														
		3 Mengupload Dokumen Kenaikan Pangkat														
		4 Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Dokumen KGB														
4	Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas	1 Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha														100%
		2 Menerima Surat Perintah Tugas														
		3 Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas														
		4 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah														

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD. PELABUHAN LAUT LOKAL

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Menyiapkan Daftar Hadir ASN dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														100%
		2 Memverifikasi Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan ASN dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														
2	Pelaksanaan Administrasi Persuratan	1 Memeriksa Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar														100%
		2 Menindaklanjuti Surat Masuk														
		3 Memverifikasi Surat Keluar														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
3	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1	Membuat Ampra TPP													100%
		2	Mengupload Surat Cuti													
		3	Mengupload Dokumen Kenaikan Pangkat													
		4	Memeriksa Kelengkapan Pengajuan Dokumen KGB													
4	Penyusunan laporan arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan	1	Membuat laporan harian arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan													100%
		2	Membuat laporan bulanan arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan													

PERJANJIAN KINERJA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Memberikan Rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor													100%
2	Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Tugas	1	Menerima Surat Perintah Tugas													100%
		2	Mengikuti Rapat sesuai Bidang Tugas													
		3	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah													
Total																

PERJANJIAN KINERJA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEAKSANA LANJUTAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Memberikan Rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor													100%

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
2	Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Tugas	1 Menerima Surat Perintah Tugas														100%
		2 Mengikuti Rapat sesuai Bidang Tugas														
		3 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah														
		Total														

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menyusun dokumen riset dan analisis kebijakan LLAJ	1 Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan LLAJ														100%
		2 Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan masalah kebijakan LLAJ														
		3 Melaksanakan pemantauan dan implementasi kebijakan LLAJ														
		4 Penyusunan naskah akademik perubahan peraturan Bupati														
2	Menyiapkan Rekomendasi Kebijakan LLAJ	1 Menyediakan rekomendasi kebijakan LLAJ													100%	
		2 Melakukan Fokus diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait denga isu, masalah dan atau kebijakan LLAJ														
		3 Melakukan Uji Publik rancangan rekomendasi kebijakan LLAJ														
3	Membuat Dokumen Laporan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan	1 Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan												100%		
		2 Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan														

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
		LLAJ															
		3 Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan LLAJ															
		4 Melakukan advokasi kebijakan LLAJ															
		5 Melakukan diseminasi kebijakan LLAJ															
		6 Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan LLAJ															
		TOTAL															

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	NO. AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Keselamatan	1 Mengumpulkan Bahann terkait Perumusan Kebijakan																100 %
		2 Mengidentifikasi, Mengkaji dan Menganalisis terkait Perumusan Kebijakan																
		3 Menyediakan Informasi /Membuat SK Rencana Induk Pelabuhan																
		4 Menyediakan Informasi / Membuat SK Penetapan Lokasi Pelabuhan																
2	Penyiapan Data Dukung Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	1 Menyiapkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Perencanaan																100 %
		2 Menyiapkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan																
		3 Menyiapkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan																
3	Penyiapan Data Dukung Dokumen Pelabuhan	1 Menyiapkan Data Dukung Ketersediaan Lahan Pelabuhan																100 %
		2 Menyiapkan Data Dukung Pengajuan Rekomendasi Kesesuaian RTRW																

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
		Kabupaten dan Provinsi															
4	Penyiapan Data Dukung Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Menyiapkan Data Dukung Laporan Hasil Pemantauan Pemeliharaan LPJUTL/ LPJUTS															100 %
		Total															

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN PROGRAM

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Penyiapan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) yang akuntabel dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)															100%
		2 Mengolah data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)															
2	Penyiapan Bahan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akuntabel dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)															100%
		2 Mengolah data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)															
3	Penyiapan Bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akuntabel dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)															100%
		2 Mengolah data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)															
4	Penyiapan Bahan Laporan Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akuntabel dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Kepala Perangkat Daerah															100%
		2 Mengolah data penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Kepala Perangkat Daerah															

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
5	Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja Triwulanan secara terukur dan continiu	1 Mengumpulkan data laporan evaluasi dan monitoring kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulanan															100%
		2 Mengolah data laporan evaluasi dan monitoring kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulanan															
6	Penyiapan bahan penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															100%
		2 Mengolah data penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
7	Penyiapan bahan penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
		2 Mengolah data penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
8	Penyiapan bahan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
		2 Mengolah data penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
9	Penyiapan bahan penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
		2 Mengolah data penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu															
10	Penyiapan bahan bahan	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana															

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Strategis dan Tepat Waktu														
		2 Mengolah data penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
11	Penyiapan bahan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
		2 Mengolah data penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Penyediaan Bahan Evaluasi SAKIP yang akuntabel dan tepat waktu	1 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi SAKIP															100%
		2 Menginventarisir kekurangan dan saran perbaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP															
2	Penyediaan Bahan penyusunan Dokumen RKA	1 Mengumpulkan bahan penyusunan Dokumen RKA															100%
		2 Mengolah bahan penyusunan Dokumen RKA															
3	Penyediaan Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat	1 Mengumpulkan Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat															100%
		2 Mengolah Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat															
4	Penyediaan Bahan Penyusunan Dokumen DPA	1 Mengumpulkan Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu															100%

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
	dengan tepat waktu	2 Mengolah Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu															
5	Penyediaan Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu															100%
		2 Mengolah Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu															
6	Penyediaan Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu	1 Mengumpulkan Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu															
		2 Mengolah Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu															

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Penyediaan berkas LHKPN dan berkas pegawai yang akan memasuki masa pensiun	1 Mengumpulkan berkas LHKPN dan Berkas pegawai yang akan memasuki masa pensiun															100%
		2 Mengupload berkas LHKPN															
		3 Mengirim berkas pegawai yang akan memasuki masa pensiun															
2	Pengumpulan data pegawai dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.	1 Menyiapkan SK pangkat terakhir dan SK Jabatan															100%
		2 Menyusun Daftar Urut Kepangkatan															
3	Pengurusan KP4, Karis/ Karsu dan Surat Tugas	1 Mengumpulkan Kartu Keluarga dan data keluarga pegawai															100%
		2 Mengumpulkan berkas Karis/Karsu															
		3 Mengupload Surat Tugas dan Surat Cuti															

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
4	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat dan Mutasi	1	Membuat surat permohonan SKBT													100%
		2	Mengumpulkan berkas Kenaikan Pangkat dan KGB													
		3	Mencatat nomor KGB													
		4	Mengusul Kenaikan Pangkat dan KGB ke BKPSDM melalui aplikasi ePangkat													
		5	Mengirim KGB ke bagian Keuangan													

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu		-													100%
		1	Menyiapkan proses penginputan RUP													
		2	Menyiapkan Surat Permintaan Penyedia													
		3	Menyiapkan Dokumen DPA untuk dilampirkan													
		4	Menyiapkan Dokumen HPS													
		5	Menyiapkan Dokumen KAK													
		6	Menyiapkan Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK													
		7	Menyiapkan SK PPK untuk dilampirkan													
		8	Menyiapkan Dokumen Rencana Waktu Pengadaan													
		9	Menyiapkan Penguploadan Dokumen Persyaratan Teknis di Aplikasi Silajara dan LPSE													
		10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan													
		11	Mendokumentasikan Kegiatan Monitoring													
12	Mengarsipkan Dokumen Kegiatan															
	Dokumen															

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
	Pelaksanaan	1 Menyiapkan Surat Permintaan Penyedia															100%
	Pembangunan Tambatan Perahu	2 Menyiapkan Dokumen DPA untuk dilampirkan															
		3 Menyiapkan Dokumen HPS															
		4 Menyiapkan Dokumen KAK															
		5 Menyiapkan Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
		6 Menyiapkan SK PPK untuk dilampirkan															
		7 Menyiapkan Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
		8 Menyiapkan Penguploadan Dokumen Persyaratan Teknis di Aplikasi Silajara dan LPSE															
		9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan															
		10 Mendokumentasikan Kegiatan Monitoring															
		11 Mengarsipkan Dokumen Kegiatan															
3	Penyusunan Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Tambatan Perahu	-														100%	
		1 Menyiapkan Surat Permintaan Penyedia															
		2 Menyiapkan Dokumen DPA untuk dilampirkan															
		3 Menyiapkan Dokumen HPS															
		4 Menyiapkan Dokumen KAK															
		5 Menyiapkan Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
		6 Menyiapkan SK PPK untuk dilampirkan															
		7 Menyiapkan Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
		8 Menyiapkan Penguploadan Dokumen Persyaratan Teknis di Aplikasi Silajara dan LPSE															
		9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan															
		10 Mendokumentasikan Kegiatan Monitoring															
	11 Mengarsipkan Dokumen Kegiatan																

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu		-															
		1	Menyiapkan Surat Permintaan Pejabat Pengadaan															
		2	Menyiapkan Surat Permintaan Penyedia															
		3	Menyiapkan Dokumen DPA untuk dilampirkan															
		4	Menyiapkan Dokumen HPS															
		5	Menyiapkan Dokumen KAK															
		6	Menyiapkan Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
		7	Menyiapkan SK PPK untuk dilampirkan															
		8	Menyiapkan Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
		9	Menyiapkan Penguploadan Dokumen Persyaratan Teknis di Aplikasi Silajara dan LPSE															
		10	Monitoring dan Evalusi Kegiatan															
		11	Mendokumentasikan Kegiatan Monitoring															
12	Mengarsipkan Dokumen Kegiatan																	
2	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan Tambatan Perahu		-														100%	
		1	Menyiapkan Surat Permintaan Penyedia															
		2	Menyiapkan Dokumen DPA untuk dilampirkan															
		3	Menyiapkan Dokumen HPS															
		4	Menyiapkan Dokumen KAK															
		5	Menyiapkan Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
		6	Menyiapkan SK PPK untuk dilampirkan															
		7	Menyiapkan Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
		8	Menyiapkan Penguploadan Dokumen															

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
		Persyaratan Teknis di Aplikasi Silajara dan LPSE															
		9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan															
		10 Mendokumentasikan Kegiatan Monitoring															
		11 Mengarsipkan Dokumen Kegiatan															
3	Penyusunan Laporan Data Tambatan Perahu																100%
		1 Menyusun Rencana Kebutuhan Tambatan Perahu															
		2 Menginput RKA Kegiatan Tambatan Perahu di Aplikasi SIPD															
		3 Menginput / Mengupdate Realisasi data Pembangunan Tambatan Perahu															

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Melakukan Analisis Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dalam Mengumpulkan, Menyiapkan, Memeriksa Data-Data dan Informasi serta Bahan Kerja terkait Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana		-															100%
		1 Proses Penyusunan Data Perencanaan Pra Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberang dan Laut Lokal																
		2 Proses Penyusunan Data Perencanaan Pra Kegiatan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pelabuhan Laut Lokal																
2	Menyusun data teknis terkait Kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku		-															100%
		1 Penyusunan SK Rencana Induk Pelabuhan Laut Lokal Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur																
		2 Penyusunan SK Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Kembang Ragi																

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
	sebagai hasil telaahan	Kecamatan Pasimasunggu																	
		3 Penyusunan SK Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Lamantu Kecamatan Pasimarannu																	
		4 Penyusunan SK Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Kalaotoa Kecamatan Pasilambena																	
		5 Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Tambolongan																	
		6 Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pasitallu																	
		7 Penetapan Lokasi Pelabuhan																	
		8 Melengkapi Data Dukung Kesesuaian RTRW Kabupaten untuk Pelabuhan Laut Lokal Tambolongan																	
		9 Melengkapi Data Dukung Kesesuaian RTRW Kabupaten untuk Pelabuhan Laut Lokal Pasitallu																	
		10 Melengkapi Data Dukung Kesesuaian RTRW Provinsi untuk Pelabuhan Laut Lokal Pulo Madu																	
		3	Melaksanakan Dukungan Teknis dan Penyiapan Bahan Penetapan Rencana Induk, dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal		-														
	1 Membuat SK Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Lokal Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur																		
	2 Membuat SK Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu																		
	3 Membuat SK Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Lamantu Kecamatan Pasimarannu																		
	4 Membuat SK Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Kalaotoa																		

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
		Kecamatan Pasilambena															
		5 Melengkapi Data Dokumen Penetapan Lok. Pelabuhan Laut Lokal Tambolongan															
		6 Melengkapi Data Dokumen Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Lokal Pasitallu															
		7 Melengkapi Data Dokumen Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Lokal Pulo Madu															
		8 Melakukan Koordinasi /Konsultasi dgn Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Dlm Rangka Pelaks Tugas															

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		-															100%
		1 Melakukan pengecekan dan Pemantauan Kondisi Fisik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)																
		2 Membuat Daftar Rekapitulasi Data Hasil Pengecekan dan Pemantauan Kondisi Fisik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)																
2	Pemeliharaan Traffic Light / Lampu Lalu Lintas		-															100%
		1 Melakukan pengecekan dan Pemantauan Kondisi Fisik Traffic Light / Lampu Lalu Lintas																
		2 Membuat daftar Rekapitulasi Data Hasil Pengecekan dan Pemantauan Kondisi Fisik Traffic Light / Lampu Lalu Lintas																

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI ANGKUTAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Survey Moda Transportasi	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey																	
		2 Menyusun Format Pengambilan data Survey																	
		3 Melaksanakan Survey Moda Transportasi																	
		4 Melaksanakan Analisis Hasil Survey Moda Transportasi																	
		5 Menyusun Laporan Hasil Survey																	
2	Survey Angkutan Pedesaan	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey																100%	
		2 Melaksanakan Survey Angkutan Pedesaan																	
		3 Menyiapkan bahan pertimbangan Penetapan/Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan																	
		4 Pengawasan pelaksanaan Tarif Angkutan Pedesaan																	
		5 Menyusun Laporan Hasil pelaksanaan survey dan penetapan/penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan																	
3	Penertiban dan pengawasan arus lalu lintas pada Hari-Hari Nasional, Daerah dan Hari - Hari Besar Keagamaan Lainnya	1 Mengikuti rapat internal Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait Penertiban dan Pengaturan arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan																100%	
		2 Mengikuti Briefing staf sebelum pelaksanaan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas																	
		3 Melaksanakan Penertiban dan pengaturan arus Lalu Lintas																	
		4 Mengikuti rapat evaluasi Pelaksanaan Penertiban dan pengaturan arus lalu																	

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
		lintas pada Hari-Hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan															
4	Pengawasan Pelayaran Rakyat (Pelra) terkait penerbitan Rekomendasi BBM jenis tertentu	1 Melakukan Pengawasan Pelayaran Rakyat (PELRA) kaitannya pada penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu															100%
		2 Menyusun laporan pengawasan Pelayaran Rakyat (pelra)															

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN KEUANGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Menerima dan memeriksa laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut															100%	
		2 Memeriksa Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permintaan Dana Ganti Uang (GU)																
		3 Memeriksa Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permintaan Dana Lansung (LS)																
2	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Mempelajari laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan															100%	
		2 Meneliti Laporan Keuangan Triwulan Semesteran																
		3 Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal																
		4 Mengidentifikasi bahan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan																

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal														
		5 Mengidentifikasi Bahan Laporan Realisasi Keuangan Per Bulan														
		6 Mengidentifikasi bahan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal														
		7 Mengidentifikasi Bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun														

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL SEKSI ANGKUTAN JALAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Survey Angkutan Pedesaan	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey														100%
		2 Melaksanakan Survey Angkutan Pedesaan														
		3 Mengelola data Angkutan Pedesaan														
		4 Menyusun Laporan Hasil Survey Angkutan Pedesaan														
2	Survey Moda Transportasi	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey														100%
		2 Melaksanakan Survey Moda Transportasi														
		3 Mengelola data Moda Transportasi														
		4 Menyusun Laporan Hasil Survey Moda Transportasi														
3	Penertiban dan pengawasan arus lalu lintas pada Hari-Hari Nasional, Daerah dan Hari	1 Mengikuti rapat internal Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait Penertiban dan Pengaturan arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan													100%	

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	- Hari Besar Keagamaan Lainnya	Hari-Hari Besar Keagamaan														
		2 Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait														
		3 Menyusun surat perintah tugas penertiban dan pengaturan arus lalu lintas														
		4 Mengikuti Briefing staff sebelum pelaksanaan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas														
		5 Mengikuti rapat evaluasi Pelaksanaan Penertiban dan pengaturan arus lalu lintas pada Hari-Hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan														
4	Pengawasan Pelayaran Rakyat (Pelra) terkait	1 Melakukan Pengawasan Pelayaran Rakyat (PELRA) kaitannya pada penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu													100%	
5	penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu	1 Mengelola data Pelayaran Rakyat terkait penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu													100%	

PERJANJIAN KINERJA BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Memfasilitasi ketersediaan Karcis untuk diserahkan ke pengelola PAD	1 Melakukan serah terima karcis dari BPKPD pada Bidang Pendapatan														100%
		2 Mendistribusikan karcis ke UPT Pengelola PAD melalui Kolektor														
		3 Membuat berita acara serah terima karcis dari Bendahara Penerima dengan Kolektor atau yang mewakili														
		4 Membuat laporan PAD yang diterima dari Kolektor														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
2	Menyiapkan buku kontrol pencatatan, penerimaan dan penyetoran karcis	1 Mencatat karcis yang masuk dari Koektor														100%
		2 Mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk/disetor dari Kolektor														
		3 Melakukan rekonsiliasi penghitungan karcis yang masuk dengan jumlah uang PAD yang disetor dari Kolektor														
3	Menyiapkan Billing penyetoran	1 Mencatat Jumlah uang PAD yang akan disetor														100%
		2 Mengambil billing untuk setoran di BPKPD pada Bidang Pendapatan														
		3 Menyetor billing ke Kas Daerah														
4	Menyetor uang PAD melalui KAS Daerah	1 Megumpulkan kwitansi bukti penyetoran														100%
		2 Menyiapkan uang setoran PAD														
		3 Membuat Slip setoran														
		4 Menerima bukti setoran virtual														

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan														100%
		2 Melakukan penyusunan peta rekayasa lalu lintas dalam pelaksanaan event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														
2	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														100%
		2 Melakukan penyusunan peta rekayasa														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
		lalu lintas dalam pelaksanaan event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.															
3	Jumlah dokumen Survey	1 Melaksanakan Survey kepadatan Lalu Lintas															100%
		2 Menyusun format pengambilan data Survey															
		3 Melakukan Survey Moda Transportasi darat															
		4 Melaksanakan survey angkutan pedesaan															
		5 Melakukan analisis data hasil survey dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh.															

PERJANJIAN KINERJA OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan																100%
		2 Menyusun Surat Tugas dan personel yang bertugas pada penertiban dan pengawasan arus lalu lintas																
2	Survey Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	1 Melaksanakan Survey lokasi pengadaan fasilitas perlengkapan jalan																100%
		2 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota																
3	Survey Kepadatan Lalu Lintas	1 Melakukan Survey Kepadatan Lalu Lintas																100%
		2 Melakukan Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan																
		3 Melakukan Survey Moda Transportasi darat																
		4 Menyusun data hasil survey																

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Jumlah penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														100%
		2 Menyusun Surat Tugas dan personil yang bertugas pada penertiban dan pengawasan arus lalu lintas														
2	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														100%
		2 Melaksanakan Survey lokasi pengadaan fasilitas perlengkapan jalan														
3	Jumlah dokumen survey	1 Menyusun Jadwal pengawasan survey														100%
		2 Melaksanakan Survey Fasilitas perlengkapan Jalan														
		3 Melaksanakan Survey Moda Transportasi Darat														
		4 Menyusun surat tugas dan personil yang bertugas pada pelaksanaan survey														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAGIAN KEUANGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat daftar gaji pegawai	1 menyiapkan nomor rekening pegawai														100%
		2 menyiapkan daftar pajak pph 21, pot. bpjs kes 4%, pot bpjs 1% dan iwp 8%														
		3 menyiapkan file template ke bank bpd														
2	Menyusun dokumen permintaan pembayaran gaji	1 mengambil ampra gaji dibagian gaji kantor keuangan														100%
		2 membuat daftar potongan gaji														
		3 pembuatan pajak pph 21, pot bpjs 1														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		%,pot bpjs kes 4 %, iwp 8%														
		4 membuat spm gaji														
		5 penandatanganan spm														
		6 mengirim berkas spm gaji kebagian gaji kantor keuangan dan ke bank bpd														
3	Menyiapkan dokumen pendukung pencairn gaji	1 membuat billing pajak dan daftar potongan gaji pegawai														100%
		2 mencetak billing pajak dan daftar potongan gaji pegawai														
		3 membuat file template untuk dikirim ke bank bpd														
4	Membuat dokumen kp4	1 mengumpulkan kartu keluarga pegawai														100%
		2 mengumpulkan sk pengkat terakhir														
		3 membuat kp4 dan mencetak kp4														
		4 penandatanganan kp4														
5	Membuat dokumen tambahan penghasilan pegawai	1 membuat ampra tpp dan mengirim ke bagian orpeg														100%
		2 mengambil kembali ampra di orpeg yang sudah ditanda tangani sekda														
		3 membuat pajak pph21, pot bpjskes 4% dan bpjs 1%														
		4 membuat spm tpp														
		5 penandatanganan spm														
		6 mengirim berkas spm gaji ke bagian gaji kantor keuangan dan file ke baank bpd														

PERJANJIAN KINERJA BENDAHARA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pencairan dana gaji dan tunjangan aparatur sipil	1 Menerima Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPM Gaji & Tunjangan ASN														100%

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	negara	2 Mentransfer Gaji dan Tunjangan ASN melalui aplikasi TNT BPD Sulselbar														
		3 Menandatangani Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPM Gaji ASN														
2	Pelaporan register penutupan kas, berita acara penutupan kas, dan surat perintah membayar (SPM)	1 Membuat Register penutupan kas														100%
		2 membuat berita acara penutupan kas														
		3 membuat Surat Perintah Membayar (SPM)														
3	Pembukuan atas semua bukti pembelanjaan dan penatausahaan keuangan pada kegiatan dinas perhubungan	1 membuat Buku kas Tunai														100%
		2 membuat Buku kas Pajak														
		3 membuat Buku kas Bank														
		4 membuat Buku kas Umum														
4	Pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	1 Membuat Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran														100%
5	Pelaporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (LPJ) belanja - fungsional	1 Membuat dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (LPJ) belanja - fungsional														100%
6	Jumlah Dokumen pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Melakukan pembayaran Kegiatan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														100%
7	Jumlah Dokumen pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Melakukan pembayaran Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														100%
8	Jumlah Dokumen	1 Melakukan pembayaran Kegiatan														100%

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	pembayaran Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
9	Jumlah Dokumen pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Melakukan pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														100%
10	Pelaporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas	1 membuat Laporan dokumen Realisasi Anggaran (LRA)														100%
		2 membuat dokumen Neraca														
		3 Membuat Laporan Dokumen Operasional (LO)														
		4 Membuat Laporan dokumen Perubahan Ekuitas														
11	Pelaporan register penutupan kas, berita acara penutupan kas, dan Surat Perintah Membayar (SPM)	1 Membuat Register penutupan kas														100%
		2 membuat berita acara penutupan kas														
		3 membuat Surat Perintah Membayar (SPM)														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melakukan stock Opname Karcis Setiap Akhir bulan Akhir Tahun	1 Melakukan Penghitungan Jumlah Karcis yang di terima dari bendahara penerima														100%
		2 Menghitung Jumlah Karcis yang terpakai														

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		dan yang tersisa														
2	Melakukan Inventarisasi Penerimaan Karcis dan Pendistribusiannya	1 Melakukan Pencatatan jumlah karcis yang diterima dari bendahara penerima														100%
		2 Melakukan Pencatatan karcis yang telah di pakai														
3	Membuat Laporan Penerimaan Retribusi	1 Membuat laporan Penerimaan Retribusi														100%
4	Melakukan Penyetoran Hasil Penagihan Retribusi	1 Menyetor hasil penagihan retribusi ke bendahara penerima														100%

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menerima, Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan	1 Menyiapkan Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar														100%
		2 Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan														
		3 Membuat Lampiran Disposisi untuk dibawa ke Pimpinan														
2	Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Membuat Daftar Hadir PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														100%
		2 Merekapitulasi Daftar Hadir Bulanan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														
3	Membuat dan Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	1 Membuat Pengusulan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														100%
		2 Membuat Dokumen Permohonan Pengajuan TPP														
4	Menginventarisir Dokumen Menurut Jenis dan Sifatnya, sesuai	1 Mendokumentasikan Surat Masuk dan Surat Keluar														100%
		2 Mendokumentasikan Rekapitulasi Daftar														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Hadir PHL														
3		Mendokumentasikan Dokumen Pengusulan PHL														
4		Mendokumentasikan Pengajuan TPP														

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. PENGELOLAAN FASILITASI PELAYANAN DARAT PELABUHAN PAMATATA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat Laporan daftar hadir	1 Membuat Absen Harian														100%
		2 Membuat Rekap Absen Bulanan														
2	Penyusunan Laporan data penumpang dan kendaraan yang melalui Pelabuhan Pamatata	1 Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa														100%
		2 Membuat Laporan Data Penumpang dan kendaraan yang melalui Pelabuhan Pamatata														
3	Penyusunan Dokumen Anjab	1 Menyusun analisis Jabatan di UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat pelabuhan Pamatata														100%
4	Penyusunan Laporan Pemakaian Karcis	1 Membuat Laporan Pengambilan Karcis														100%
		2 Membuat Laporan Jumlah Pemakaian Karcis														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. PENGELOLAAN FASILITASI PELAYANAN DARAT PELABUHAN PAMATATA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Penarikan Retribusi	1 Mengumpulkan data pemakaian karcis dan jumlah pungutan retribusi dari pemungut														100%
		2 Membuat rekap pemakaian karcis dan jumlah pungutan retribusi														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
2	Penyusunan Laporan Penyetoran PAD yang dibuat	1 Membuat rekap laporan setoran PAD														100%
		2 Menyetor PAD ke Bendahara Penerimaan														
3	Penyusunan laporan data penumpang	1 Mengumpulkan data laporan penumpang dari petugas lapangan														100%
		2 Membuat rekap data laporan penumpang														
		3 Menyampaikan laporan data penumpang ke Bidang Lalu Lintas														
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Sesuai Surat Tugas	1 Membuat draf surat tugas sesuai perintah atasan														100%
		2 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan ke atasan														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. PENGELOLAAN FASILITASI PELAYANAN DARAT PELABUHAN PAMATATA

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Retribusi	1 Mengumpulkan data pemakian karcis dari pemungut														100%
		2 Membuat rekap pemakian karcis dan jumlah pungutan retribusi														
2	Penyusunan Laporan Penyetoran PAD	1 Membuat rekap laporan setoran PAD														100%
		2 Menyetor PAD ke Kolektor														
3	Penyusunan laporan Pelaksanaan kegiatan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	1 Memungut retribusi dari pengguna jasa														100%
		2 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penarikan Retribusi														

PERJANJIAN KINERJA OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL UPTD. TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pengawasan Arus Kendaraan dan Angkutan Penumpang di Terminal	1 Melakukan Penarikan Retribusi Terminal terhadap Pengguna Jasa														100%
		2 Memverifikasi Data Golongan Jenis Kendaraan														
		3 Menghimpun data kendaraan dan penumpang tiba dan berangkat di Terminal														
2	Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran	1 Melakukan pengaturan Kendaraan di area Terminal														100%
		2 Melakukan pengaturan parkir														
		3 Melakukan penarikan retribusi parkir														

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA DATA DAN INFORMASI UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Dokumen data kendaraan	1 Memantau kendaraan yang melintas di area terminal														100%
		2 Menyiapkan Rambu penunjuk arah														
2	Penyusunan Dokumen data kendaraan di Terminal	1 Mengatur kendaraan yang ada di area terminal														100%
		2 Memantau Kendaraan yang ada di terminal														
3	Penyusunan dokumen Data Penumpang	1 Menyiapkan buku catatan dan memantau kendaraan yang masuk di area terminal														100%
		2 Mencatat jumlah penumpang yang ada di area terminal														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
4	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan	1 Menerima surat tugas														100%
		2 Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melakukan pencataan penerimaan dan pengeluaran karcis parkir dan karcis retribusi masuk terminal	1 Melakukan permintaan karcis melalui bendahara penerima														100%
		2 Menghitung pemakaian karcis														
2	Melakukan stok opname karcis parkir dan retribusi masuk terminal pada akhir tahun sebagai laporan pertanggungjawaban	1 Mencatat jumlah Pemakaian Karcis														100%
3	Pelaksanaan Penarikan Retribusi Terhadap Pengguna Jasa	1 Menyiapkan Karcis														100%
4	Pengawasan Arus Kendaraan dan Angkutan Penumpang di UPTD Terminal dan Perparkiran berdasarkan Golongan	1 Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa														100%
		2 Memverifikasi Data Golongan Jenis Kendaraan														

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN UPTD PELABUHAN LAUT LOKAL

NO	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Pengawasan	1 Mengatur arus lalilintas dalam wilayah Pelabuhan														100%
		2 Mengawasi segala aktivitas angkutan dalam wilayah pelabuhan														
2	Penyusunan Laporan Data Penumpang	1 Melakukan Pencatatan jumlah penumpang secara manual pada pos kedua														100%
		2 Mencocokkan data penumpang yang di peroleh pada pos dua dengan data penumpang yang tercatat pada manifes														
3	Penyusunan Laporan Data Golongan dan Jenis Kendaraan	1 Melakukan Pencatatan jumlah kendaraan berdasarkan golongannya yang masuk melalui pos dua														100%
		2 Mencocokkan data yang diperoleh dengan manifes														

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menerima, Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan	1 Menyiapkan Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar														100%
		2 Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan														
		3 Membuat Lampiran Disposisi untuk dibawa ke Pimpinan														
2	Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Membuat Daftar Hadir PNS UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														100%
		2 Melampirkan Surat Cuti bagi ASN yang mengajukan Cuti Sakit atau Cuti														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
3	Membuat dan Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Tahunan														100%
		3 Merekapitulasi Daftar Hadir Bulanan PNS dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														
		1 Membuat Surat Permohonan Bebas Temuan untuk Kenaikan Gaji Berkala														
		2 Melengkapi Dokumen Pendukung Permohonan Kenaikan Gaji Berkala PNS														
4	Menginventarisir Dokumen Menurut Jenis dan Sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	3 Membuat Surat Cuti bagi PNS yang mengajukan Cuti Sakit atau Cuti Tahunan														100%
		4 Melengkapi Dokumen Pendukung Permohonan Kenaikan Pangkat PNS														
		Mendokumentasikan Surat Masuk dan Surat Keluar														
		Mendokumentasikan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS														
		Mendokumentasikan Surat Permohonan Bebas Temuan untuk KGB dan Kenaikan Pangkat														
		Mendokumentasikan Surat Permohonan Bebas Temuan untuk KGB														

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan rencana kebutuhan barang	1 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2025														100%
		2 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2025														
2	Penyusunan Laporan	1 Penyusunan Laporan Data Barang														100%

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT			
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
	Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan	Persediaan/Kartu Persediaan triwulan pertama																	
		2 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan/Kartu Persediaan triwulan 2																	
		3 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan/Kartu Persediaan triwulan 3																	
		4 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan/Kartu Persediaan Final																	
3	Penyusunan Laporan Data Pengguna Barang dan Kendaraan / Update Data Pengguna Kendaraan	1 Penyusunan Laporan Data Pengguna Kendaraan Dinas T.A 2025															100%		
		2 Penyusunan Laporan Data Kondisi Barang Inventaris dan Kendaraan Dinas T.A 2025																	
4	Penyusunan Laporan dan data inventaris dan pengadaan barang dari belanja modal	1 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 1															100%		
		2 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 2																	
		3 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 3																	
		4 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Akhir Tahun																	
5	Penyusunan Laporan dan Daftar Rincian Aset tetap dan Kartu Inventaris Barang	1 Penyusunan Dokumen Penyusutan Aset per 31 Desember 2025 dan Sinkronisasi Data Aplikasi BMD dan FMIS															100%		
		2 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 1																	
		3 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 2																	
		4 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 3																	
		5 Penyusunan daftar mutasi aset Final																	

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
6	Penyusunan Laporan Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2025														100%

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SEKSI ANGKUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Survey Moda Transportasi	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey														100%
		2 Menyusun Format Pengambilan data Survey														
		3 Melaksanakan Survey Moda Transportasi														
		4 Menyiapkan bahan-bahan pertimbangan perumusan kebijakan di Bidang Transportasi														
		5 Mengikuti rapat evaluasi Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
2	Survey Angkutan Pedesaan	1 Mengikuti Briefing personil sebelum pelaksanaan survey														100%
		2 Melaksanakan Survey Angkutan Pedesaan														
		3 Menyiapkan bahan pertimbangan Penetapan/Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan														
		4 Pengawasan pelaksanaan Tarif Angkutan Pedesaan														
		5 Menyusun Laporan Hasil pelaksanaan survey dan penetapan/penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan														

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
3	Penertiban dan pengawasan arus lalu lintas pada Hari-Hari Nasional, Daerah dan Hari - Hari Besar Keagamaan Lainnya	1 Mengikuti rapat internal Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait Penertiban dan Pengaturan arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan lainnya														100%
		2 Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait														
		3 Mengikuti Briefing staff sebelum pelaksanaan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas														
		4 Melaksanakan Penertiban dan pengaturan arus Lalu Lintas														
		5 Mengikuti rapat evaluasi Pelaksanaan Penertiban dan pengaturan arus lalu lintas pada Hari-Hari Besar Nasional, Daerah dan Hari-Hari Besar Keagamaan														
4	Pengawasan Pelayaran Rakyat (Pelra) terkait penerbitan Rekomendasi BBM jenis tertentu	1 Melakukan Pengawasan Pelayaran Rakyat (PELRA) kaitannya pada penerbitan Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu (solar)														100%
		2 Menyiapkan bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan di Bidang Angkutan Laut														

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama tahun berjalan.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, khususnya dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode pengukuran kinerja dilakukan melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, yang selanjutnya dihitung dalam bentuk persentase capaian kinerja. Persentase capaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil, sesuai dengan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber data pengukuran kinerja berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang, dokumen monitoring dan evaluasi, laporan realisasi fisik dan keuangan, serta data pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara periodik oleh unit kerja terkait dan dikoordinasikan oleh sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan,

mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Selain itu, pengukuran kinerja juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Dengan dilaksanakannya pengukuran kinerja secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan serta mendukung tercapainya pembangunan transportasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat kepulauan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kerangka pengukuran kinerja tersebut adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui peringkat kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja digunakan skala penilaian kinerja pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian suatu kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan dan sasaran yang harus dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:

Tujuan 1

Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan

Tujuan **“Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan”** diukur dengan indikator kinerja sebagai pengukur realisasi capaian kinerja, yaitu Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Terminal per tahun dengan formulasi perhitungan adalah jumlah orang yang melalui pelabuhan,

bandara dan terminal dalam satu tahun. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Pelabuhan/Terminal/ Bandara	Jumlah Penumpang		Jumlah	Ket.
		Berangkat	Tiba		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelabuhan Penyebrangan Pamatata	123.858	119.210	243.068	
2.	Pelabuhan Kayuadi	5.678	6.854	12.532	
3.	Pelabuhan Jampea	13.362	18.280	31.642	
4.	Pelabuhan Bonerate	10.801	11.659	22.460	
5.	Pelabuhan Kalaotoa	9.120	9.627	18.747	
6.	Terminal Benteng	19.713	20.986	40.699	
7.	Bandara H. Aroeppala	2.164	2.110	4.274	
Jumlah		186.691	191.459	378.150	

Pengukuran capaian kinerja Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat diketahui dari jumlah orang yang melalui pelabuhan, bandara dan terminal dalam tahun 2025 sebagaimana tabel di atas yaitu sebesar 378.150 orang.

Sasaran 1

Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan

Sasaran **“Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan”** diukur dengan indikator kinerja sebagai pengukur realisasi capaian kinerja, yaitu Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan formulasi perhitungan adalah Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang dibagi Jumlah Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dikali 100%. Pada tahun 2025 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang adalah sebanyak 2.273 unit dari 4.305 unit Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan atau sebesar 52,80% sehingga menghasikan capaian kinerja sebesar 102,70% dari target kinerja sebesar 51,41%.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Data Pemasangan dan Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Lokasi/ Kecamatan	Rambu Lalu Lintas		Guardrail		Deliniator		Cermin Tikungan		Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah		Ket.
		Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	Terpasang (unit)	Kebutuhan (unit)	
1.	Benteng	119	46	-	-	-	-	-	-	856	1500	975	1546	
2.	Bontoharu	91	203	2	10	1	6	-	1	262	500	356	720	
3.	Bontomanai	29	316	3	10	-	2	-	1	180	300	212	629	
4.	Buki	2	110	2	1	-	2	-	-	137	325	141	438	
5.	Bontomatene	18	73	3	2	-	-	-	-	377	525	398	600	
6.	Bontosikuyu	-	72	-	-	-	-	-	-	183	300	183	372	
7.	Pasilambena	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	
8.	Pasimasunggu	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
9.	Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
Total		259	820	10	23	1	10	-	2	2.003	3.450	2.273	4.305	

Sasaran 3**Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah**

Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Transportasi Antaarwilayah” diukur dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Fasilitas Transportasi yang Terbangun dengan formulasi Jumlah Pembangunan Fasilitas Transportasi pada tahun n, dimana pada tahun 2025 terdapat satu unit pembangunan/pemasangan baru fasilitas transportasi dari 3 (tiga) unit yang ditargetkan yaitu Pembangunan Dermaga Apung (Floating Dock) Kec. Takabonerate Pulau Rajuni sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 33,33%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.395.635.839. Selain itu sejumlah Rp 521.459.600 dialokasikan untuk rehabilitasi tambatan perahu antara lain Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Batang Kecamatan Takabonerate senilai Rp339.604.800 dan Penambahan Panjang Tambatan Perahu Dusun Letta Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu senilai Rp173.131.000 yang tentunya diharapkan dapat memperpanjang usia pemanfaatan tambatan perahu tersebut sehingga dapat difungsikan dengan maksimal. Sampai dengan tahun 2025 jumlah fasilitas transportasi yang telah dibangun adalah sebanyak 61 unit, 29 unit dalam kondisi baik dan sebanyak 32 unit dalam kondisi rusak. Data fasilitas transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Daftar Fasilitas Transportasi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Kecamatan	Dermaga Apung	Tambatan Perahu	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pasilambena	-	8	8
2	Pasimarannu	-	6	9
3	Pasimasunggu	-	7	7
4	Pasimasunggu Timur	-	5	5
5	Takabonerate	1	9	10
6	Bontosikuyu	-	11	11
7	Bontoharu	-	8	8
8	Benteng	-	-	-
9	Bontomanai	-	1	1
10	Bontomatene	-	4	4
11	Buki	-	1	1
Jumlah		1	60	61

Indikator tujuan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2025 belum dapat terealisasi dan menunjukkan kondisi yang sama seperti Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena indikator reformasi birokrasi perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, merupakan indikator yang penilaiannya dilakukan secara eksternal dan terintegrasi melalui mekanisme evaluasi oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, capaian indikator reformasi birokrasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan pada satu tahun anggaran saja, tetapi merupakan hasil dari implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai komponen seperti manajemen kinerja, penataan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Belum terealisasinya indikator tersebut pada Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi, optimalisasi implementasi manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang memerlukan proses penyesuaian dan penguatan secara bertahap. Selain itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi umumnya menggunakan data dan penilaian periode sebelumnya, sehingga capaian yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan upaya yang telah dilakukan pada tahun berjalan.

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan implementasi SAKIP, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga indikator tujuan

reformasi birokrasi perangkat daerah dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 5

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran “**Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah**” diukur dengan tiga indikator kinerja, yaitu 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, 2) Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1 dimana pada tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perhubungan adalah sebesar 64,20 dengan predikat baik sementara target yang direncanakan adalah sebesar 70,00 sehingga capaian kinerja Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebesar 91,71%. Capaian indikator nilai SAKIP Dinas Perhubungan dapat dilihat dari tabel hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Ket.
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	21,30	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,40	17,40	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75	10,50	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	15,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,45	64,20	
Predikat Kinerja			B	B	

3) Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan diperoleh dari Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir



Tahun pada Tahun n-1, dimana realisasi capaian kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan tahun 2024 adalah sesuai dengan Standar Akuntansi, hasil ini diperoleh dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disahkan dengan :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
- 3) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 774);

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diaudit.
- 2) Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 sesuai belanja tahun anggaran 2024 telah didistribusikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2024.

- 3) Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024. Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada table-tabel berikut :

Tabel 2.1.7 Neraca Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	109.520.942.836,00	112.315.715.252,62
1.1	ASET LANCAR	207.131.326,67	121.304.841,67
1.1.01	Kas dan Setara Kas	160.929.060,00	18.679.000,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	160.929.060,00	18.679.000,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	7.910.266,67	16.810.791,67
1.1.12	Persediaan	38.292.000,00	85.815.050,00
	JUMLAH ASET LANCAR	207.131.326,67	121.304.841,67
1.3	ASET TETAP	109.228.384.708,33	112.037.718.609,95
1.3.01	Tanah	2.822.320.400,00	2.822.320.400,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.507.807.184,95	13.471.407.184,95
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.772.742.390,00	5.772.742.390,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.752.166.005,00	118.128.382.005,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	898.700.000,00	898.700.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.035.736.040,00	1.035.736.040,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(33.561.087.311,62)	(30.091.569.410,00)
	JUMLAH ASET TETAP	109.228.384.708,33	112.037.718.609,95
1.5	ASET LAINNYA	85.426.801,00	156.691.801,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	71.265.000,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	71.265.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	74.000.000,00	74.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.162.660.301,00	2.162.660.301,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(74.000.000,00)	(74.000.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.077.233.500,00)	(2.077.233.500,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	85.426.801,00	156.691.801,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	109.520.942.836,00	112.315.715.252,62
2	KEWAJIBAN	228.472.840,00	282.704.023,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	228.472.840,00	282.704.023,00
2.1.06	Utang Belanja	8.052.040,00	8.559.523,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	220.420.800,00	274.144.500,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	228.472.840,00	282.704.023,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	228.472.840,00	282.704.023,00
3	EKUITAS	83.372.279.206,00	86.041.555.439,62
3.1	EKUITAS	83.372.279.206,00	86.041.555.439,62
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.044.567.374,78)	(11.034.042.884,72)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.954.696.770,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	83.372.279.206,00	86.041.555.439,62
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	83.600.752.046,00	86.324.259.462,62

Tabel 2.1.8 Laporan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.132.844.000,00	705.410.820,00	62,26	713.745.930,00
5	BELANJA DAERAH	6.703.547.500,00	6.517.857.530,00	97,22	9.899.651.452,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.977.444.100,00	5.803.952.330,00	97,09	8.223.539.302,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.518.100.000,00	4.375.410.263,00	96,84	4.250.672.830,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.344.100,00	1.428.542.067,00	97,88	3.972.866.472,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.977.444.100,00	5.803.952.330,00	97,09	8.223.539.302,00
5.2	BELANJA MODAL	726.103.400,00	713.905.200,00	98,32	1.676.112.150,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	36.400.000,00	95,78	204.967.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	688.103.400,00	677.505.200,00	98,45	1.468.645.150,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	726.103.400,00	713.905.200,00	98,32	1.676.112.150,00
	JUMLAH BELANJA	6.703.547.500,00	6.517.857.530,00	97,22	9.899.651.452,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.570.703.500,00)	(5.812.446.710,00)	104,33	(9.185.905.522,00)

**Tabel 2.1.9 Laporan Operasional Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	705.413.320,00	1.271.998.004,00	(566.584.684,00)	(44,54)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	705.410.820,00	785.010.930,00	(79.600.110,00)	(10,14)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	705.410.820,00	785.010.930,00	(79.600.110,00)	(10,14)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	705.410.820,00	785.010.930,00	(79.600.110,00)	(10,14)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2.500,00	486.987.074,00	(486.984.574,00)	(99,99)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	2.500,00	486.987.074,00	(486.984.574,00)	(99,99)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2.500,00	486.987.074,00	(486.984.574,00)	(99,99)
	JUMLAH PENDAPATAN	705.413.320,00	1.271.998.004,00	(566.584.684,00)	(44,54)
8	BEBAN	9.749.980.694,78	12.306.040.888,72	(2.556.060.193,94)	(20,77)
8.1	BEBAN OPERASI	5.859.868.422,00	8.215.366.281,67	(2.355.497.859,67)	(28,67)
8.1.01	Beban Pegawai	4.375.410.263,00	4.250.672.830,00	124.737.433,00	2,93
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.484.458.159,00	3.964.693.451,67	(2.480.235.292,67)	(62,55)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.859.868.422,00	8.215.366.281,67	(2.355.497.859,67)	(28,67)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.890.112.272,78	4.090.674.607,05	(200.562.334,27)	(4,90)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	916.837.283,93	993.457.660,05	(76.620.376,12)	(7,71)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.366.043,21	115.517.392,00	(151.348,79)	(0,13)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.857.908.945,64	2.981.699.555,00	(123.790.609,36)	(4,15)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.890.112.272,78	4.090.674.607,05	(200.562.334,27)	(4,90)
	JUMLAH BEBAN	9.749.980.694,78	12.306.040.888,72	(2.556.060.193,94)	(20,77)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.044.567.374,78)	(11.034.042.884,72)	1.989.475.509,94	(18,03)

**Tabel 2.1.9 Laporan Perubahan Ekuitas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	86.041.555.439,62	87.905.365.202,34
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.044.567.374,78)	(11.034.042.884,72)
RK PPKD	5.954.696.770,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	420.594.371,16	9.170.233.122,00
EKUITAS AKHIR	83.372.279.206,00	86.041.555.439,62

- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPKP-LPPM) Universitas Hasanuddin, sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara independen, objektif, dan terukur.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan sebesar 77,40 dari target yang ditetapkan sebesar 65,00, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan berada dalam kategori Baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan sebesar 76,61 dari target sebesar 85,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat masih berada dalam kategori Baik, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari aspek sarana dan prasarana, kompetensi petugas pelayanan, maupun sistem pelayanan yang lebih efektif dan responsif.

Pada Tahun Anggaran 2025, Survei Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan, sehingga nilai Indeks Kepuasan Layanan pada tahun pelaporan belum dapat diukur. Dengan tidak tersedianya data hasil survei pada tahun berjalan, maka evaluasi kinerja indikator ini mengacu pada hasil survei tahun sebelumnya serta evaluasi internal terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembenahan sistem pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan respons terhadap pengaduan dan masukan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui kerja sama dengan PPKP-

LPPM Universitas Hasanuddin akan kembali melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hasil dari pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun	Orang	311.173	378.150	121,52	Sangat Tinggi
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	51,41	52,80	102,70	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	Unit	3	1	33,33	Sangat Rendah
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70,00 (B)	-	-	-
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,00 (B)	64,20 (B)	91,71	Sangat Tinggi
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah		86,00 (B)	-	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator berada pada kategori Sangat Tinggi, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

Pada sasaran Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, indikator jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, dan terminal per tahun ditargetkan sebesar

311.173 orang dan terealisasi sebesar 378.150 orang atau mencapai 121,52%, dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dan distribusi barang mengalami peningkatan yang signifikan, yang mencerminkan semakin optimalnya fungsi sarana dan prasarana transportasi.

Pada sasaran Terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan, indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan ditargetkan sebesar 51,41% dan terealisasi sebesar 52,80% atau mencapai 102,70%, dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan fasilitas keselamatan jalan telah dilaksanakan secara optimal guna mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pada sasaran Meningkatkan fasilitas transportasi antarwilayah, indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun ditargetkan sebanyak 3 unit, namun terealisasi sebanyak 1 unit atau mencapai 33,33%, dengan kategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, penyesuaian prioritas pembangunan, serta adanya kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas transportasi.

Pada sasaran Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 70,00 (kategori B), namun belum terdapat realisasi pada tahun pelaporan, sehingga capaian indikator ini belum dapat diukur.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah, terdapat beberapa indikator, yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target sebesar 70,00 (kategori B) dan terealisasi sebesar 64,20 (kategori B), atau mencapai 91,71%, dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan target "Sesuai" dan terealisasi "Sesuai", sehingga capaian indikator ini dinyatakan tercapai dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah, dengan target sebesar 86,00 (kategori B), namun belum terdapat realisasi pada tahun pelaporan sehingga belum dapat diukur tingkat capaiannya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam mendukung kelancaran transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta peningkatan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan pada pembangunan fasilitas transportasi dan pemenuhan indikator yang belum terealisasi guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan metode analisis kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis ini dilakukan secara komprehensif melalui perbandingan target dan realisasi kinerja, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Adapun analisis hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sesuai yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, sebagian besar indikator kinerja sasaran telah mencapai target yang ditetapkan,

bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Terminal per tahun	Orang	311.173	378.150	121,52	Sangat Tinggi
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	51,41	52,80	102,70	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	Unit	3	1	33,33	Sangat Rendah
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70,00 (B)	-	-	-
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,00 (B)	64,20 (B)	91,71	Sangat Tinggi
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah		86,00 (B)	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.11, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator mencapai kategori **Sangat Tinggi**, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada sasaran **Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan**, indikator jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, dan terminal per tahun menunjukkan capaian sebesar 378.150 orang dari target sebesar 311.173 orang atau sebesar 121,52% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran **Terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan**, indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan menunjukkan capaian sebesar 52,80% dari target sebesar 51,41% atau sebesar 102,70% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas perlengkapan jalan telah dilaksanakan secara optimal dalam mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pada sasaran **Meningkatnya fasilitas transportasi antarwilayah**, indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun menunjukkan capaian sebesar 1 unit dari target sebesar 3 unit atau sebesar 33,33% dengan kategori **Sangat Rendah**. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas transportasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran Mewujudkan **reformasi birokrasi perangkat daerah**, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum memiliki capaian pada Tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan indikator tersebut.

Pada sasaran **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah**, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian sebesar 64,20 dari target sebesar 70,00 atau sebesar 91,71% dengan kategori **Sangat Tinggi**, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik. Indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum memiliki capaian pada Tahun 2025 karena survei kepuasan masyarakat tidak dilaksanakan, sehingga capaian indikator tersebut belum dapat diukur.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai kategori

sangat tinggi, meskipun masih terdapat indikator yang belum optimal dan belum dapat diukur.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada peningkatan penggunaan sarana transportasi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai perencanaan, khususnya dalam penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi.
3. Dukungan anggaran yang memadai, sehingga sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.
5. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun instansi lainnya.
6. Penerapan sistem pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik, sehingga mendukung pencapaian indikator akuntabilitas perangkat daerah.

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas transportasi, sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, seperti proses perencanaan teknis dan pengadaan barang dan jasa.
3. Kondisi geografis wilayah kepulauan, yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan transportasi membutuhkan sumber daya yang lebih besar.
4. Belum dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat, sehingga capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur.
5. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

2. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui perkembangan

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar serta untuk menilai peningkatan atau penurunan capaian kinerja sebagai bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Ket.
1	2	3	4	5	6	8
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Terminl per tahun	Orang	330.670	378.150	
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	52,06	52,80	
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	Unit	-	1	
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		-	-	
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		63,45 (B)	64,20 (B)	
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah		76,61 (B)	-	

Pada indikator Jumlah Orang/Barang melalui dermaga, bandara, dan terminal per tahun, capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 330.670 orang, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 378.150 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah. Hal ini mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan transportasi serta efektivitas penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada indikator Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan, capaian Tahun 2024 sebesar 52,06%, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 52,80%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dan penambahan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan transportasi darat.

Pada indikator Jumlah Fasilitas Transportasi yang Terbangun, capaian Tahun 2024 belum terealisasi sesuai target, sedangkan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 1 unit dari target 3 unit. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pembangunan fasilitas transportasi, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, capaian Tahun 2025 belum tersedia sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Namun demikian, Dinas Perhubungan tetap melaksanakan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian Tahun 2024 sebesar 63,45 (kategori B), sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 64,20 (kategori B). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Pada indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 sama-sama memperoleh predikat “Sesuai”. Hal ini menunjukkan konsistensi Dinas Perhubungan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah, pada Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 76,61 (kategori B). Namun pada Tahun 2025, survei kepuasan masyarakat tidak dilaksanakan sehingga tidak terdapat capaian pada indikator ini. Tidak dilaksanakannya survei tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat antara Tahun 2025 dengan Tahun 2024. Ke depan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat perlu dilaksanakan secara konsisten untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar indikator dibandingkan Tahun 2024, khususnya pada indikator mobilitas

transportasi, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, dan nilai SAKIP perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan belum dapat diukur.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator kinerja sasaran antara Tahun 2025 dan Tahun 2024, terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan, serta terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal perangkat daerah, yaitu :

1. Faktor Pendukung Peningkatan Capaian Kinerja

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan capaian indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan Tahun 2024 antara lain:

- a. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian, Terjadi peningkatan jumlah orang dan barang yang menggunakan sarana transportasi darat, laut, dan udara dibandingkan Tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, perjalanan masyarakat antarwilayah, serta meningkatnya kebutuhan distribusi barang.
- b. Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan transportasi, Pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi, berjalan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.
- c. Perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Adanya peningkatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sehingga berdampak pada peningkatan nilai SAKIP dibandingkan Tahun 2024.
- d. Dukungan anggaran dan optimalisasi penggunaan sumber daya, Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien pada Tahun 2025 mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
- e. Peningkatan koordinasi dan komitmen aparatur perangkat daerah, Koordinasi internal dan eksternal yang lebih baik serta komitmen

aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian kinerja.

2. Faktor Penghambat dan Penyebab Penurunan atau Tidak Optimalnya Capaian Kinerja

Beberapa faktor yang menghambat atau menyebabkan belum optimalnya capaian indikator dibandingkan Tahun 2024 antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan fasilitas transportasi, Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua kegiatan pembangunan fasilitas transportasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun belum optimal.
- b. Kendala teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, Beberapa kegiatan mengalami kendala teknis dan administratif, seperti proses perencanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang mempengaruhi capaian kinerja.
- c. Kondisi geografis wilayah kepulauan, Karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan transportasi, yang memerlukan sumber daya dan waktu yang lebih besar.
- d. Tidak dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025, Tidak dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat pada Tahun 2025 menyebabkan tidak tersedianya data capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.
- e. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana pendukung tertentu mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

3. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2021–2026 dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta mengukur progres pencapaian target jangka menengah. Tingkat kemajuan dihitung dengan membandingkan realisasi Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra, kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat pencapaiannya yang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perhubungan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/ Bandara/Termin 1 per tahun	378.150	357.848	105,67
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	52,80	52,10	101,34
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	1	4	25,00
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	75,00 (B)	-
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,20 (B)	75,00 (B)	85,60
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	-	89,00 (B)	-

Pada sasaran **Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan**, indikator jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, dan terminal per tahun menunjukkan realisasi sebesar 378.150 orang dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 357.848 orang, dengan tingkat kemajuan sebesar 105,67%. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, karena telah melampaui target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dan distribusi barang telah berkembang secara optimal.

Pada sasaran **Terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan**, indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan menunjukkan realisasi sebesar 52,80% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 52,10%, dengan tingkat kemajuan sebesar 101,34%. Indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, karena telah mencapai dan melampaui target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif.

Pada sasaran **Meningkatnya fasilitas transportasi antarwilayah**, indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun menunjukkan realisasi sebesar 1 unit dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 4 unit, dengan tingkat kemajuan sebesar 25,00%. Indikator ini termasuk dalam kategori **Rendah**, karena capaian masih jauh dari target akhir Renstra. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kendala teknis, dan penyesuaian prioritas pembangunan.

Pada sasaran **Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah**, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target akhir Renstra sebesar 75,00 (kategori B), namun belum terdapat realisasi capaian pada Tahun 2025, sehingga tingkat kemajuan indikator ini belum dapat diukur dan belum dapat dikategorikan.

Pada sasaran **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah**, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan realisasi sebesar 64,20 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 75,00, dengan tingkat kemajuan sebesar 85,60%. Indikator ini termasuk dalam kategori **Baik**, karena capaian telah mendekati target akhir Renstra dan menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target akhir Renstra, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori **Tercapai**, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah memiliki target akhir Renstra sebesar 89,00 (kategori B), namun pada Tahun 2025 belum terdapat capaian karena survei kepuasan masyarakat tidak dilaksanakan, sehingga tingkat

kemajuan indikator ini belum dapat diukur dan belum dapat dikategorikan.

Secara keseluruhan, kemajuan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra menunjukkan hasil yang **Baik hingga Sangat Baik**. Beberapa indikator utama telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra, khususnya pada indikator mobilitas transportasi dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Selain itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan kemajuan dalam kategori **Baik** dan mendekati target akhir Renstra.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang termasuk dalam kategori **Rendah**, yaitu pembangunan fasilitas transportasi, serta indikator yang belum dapat diukur karena belum tersedianya data capaian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal, peningkatan dukungan anggaran, serta penguatan tata kelola perangkat daerah guna memastikan seluruh target Renstra dapat tercapai pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/ Barang melalui dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun	311.173	378.150	121,52	1) Meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah daratan dan kepulauan. 2) Operasional sarana dan prasarana transportasi berjalan dengan baik	1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi; 2) Meningkatkan pengawasan operasional; 3) Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						3) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.	4) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
2.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	51,41	52,80	102,70	Pelaksanaan program pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berjalan sesuai perencanaan serta didukung ketersediaan anggaran.	1) Melanjutkan pemasangan secara bertahap; 2) melakukan pemeliharaan rutin; 3) mengidentifikasi kebutuhan fasilitas secara berkala; 4) meningkatkan koordinasi keselamatan jalan.
3.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	3	1	33,33	Keterbatasan anggaran, kendala teknis dan administratif, serta penyesuaian prioritas pembangunan daerah.	1) Mengusulkan peningkatan anggaran; 2) meningkatkan kesiapan perencanaan teknis; 3) memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat; 4) melaksanakan pembangunan secara bertahap sesuai prioritas.
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)	-	-	Tidak adanya evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun pelaporan, sehingga capaian indikator belum dapat diukur.	1) Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi; 2) melengkapi dokumen pendukung; 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan; 4) memperkuat koordinasi dengan instansi pembina RB.
5.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00 (B)	64,20 (B)	91,71	Perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.	1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan cascading kinerja; 2) memperkuat monitoring dan evaluasi; 3) meningkatkan kapasitas SDM; 4) melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen kinerja.
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, menunjukkan tata kelola keuangan yang	1) Mempertahankan kualitas laporan keuangan; 2) meningkatkan kompetensi pengelola keuangan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						tertib dan akuntabel.	3) memperkuat pengendalian internal; 4) mengoptimalkan sistem informasi keuangan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	86,00 (B)	-	-	Tidak terdapat capaian karena survei kepuasan masyarakat tidak dilaksanakan pada Tahun 2025.	1) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala; 2) meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3) memperbaiki sarana pelayanan; 4) melakukan evaluasi tindak lanjut hasil survei.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dapat dilakukan analisis terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Pada indikator **Jumlah Orang/Barang melalui dermaga, bandara, dan terminal per tahun**, capaian sebesar 378.150 orang dari target sebesar 311.173 orang atau sebesar 121,52%, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah, serta optimalnya operasional sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator ini. Solusi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Pada indikator **Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan**, capaian sebesar 52,80% dari target sebesar 51,41% atau sebesar 102,70%, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang berjalan sesuai dengan perencanaan serta didukung oleh ketersediaan anggaran. Solusi yang dilakukan adalah dengan melanjutkan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan secara

bertahap, melakukan pemeliharaan fasilitas yang telah terpasang, serta meningkatkan identifikasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan guna mendukung keselamatan lalu lintas.

Pada indikator **Jumlah Fasilitas Transportasi yang Terbangun**, capaian sebesar 1 unit dari target sebesar 3 unit atau sebesar 33,33%, yang menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya penyesuaian prioritas pembangunan daerah. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan perencanaan kegiatan secara lebih optimal, mengusulkan peningkatan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan fasilitas transportasi.

Pada indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian indikator belum tersedia pada Tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan analisis capaian secara kuantitatif. Namun demikian, Dinas Perhubungan tetap melaksanakan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan administrasi. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

Pada indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, capaian sebesar 64,20 dari target sebesar 70,00 atau sebesar 91,71%, yang menunjukkan bahwa indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan peningkatan. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja.

Pada indikator **Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**, capaian indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Solusi yang dilakukan adalah dengan

mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah**, capaian indikator belum tersedia karena survei kepuasan masyarakat tidak dilaksanakan pada Tahun 2025. Hal ini menyebabkan capaian indikator belum dapat diukur. Solusi yang dilakukan adalah dengan merencanakan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala pada tahun berikutnya guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target serta indikator yang belum dapat diukur, sehingga diperlukan upaya peningkatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan tingkat penyerapan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator tersebut.

Dalam struktur perencanaan kinerja, indikator pada level tujuan merupakan indikator agregat yang didukung oleh beberapa indikator pada level sasaran. Oleh karena itu, indikator tujuan tidak dihitung dalam analisis efisiensi, karena alokasi anggarannya merupakan akumulasi dari alokasi anggaran pada indikator sasaran di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda anggaran (double counting) dan untuk memastikan bahwa analisis efisiensi mencerminkan hubungan langsung antara penggunaan anggaran dan output yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memiliki alokasi anggaran langsung dan menghasilkan output terukur, yaitu indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dan indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun. Capaian dan realisasi anggaran untuk kedua indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan	Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	102,70	1.200.586.000	1.174.575.849	97,83
2	Meningkatnya fasilitas transportasi antarwilayah	Jumlah fasilitas transportasi yang terbangun	33,33	3.922.991.900	3.667.971.487	93,50
Jumlah / Rata-rata Geometrik			58,52	5.123.577.900	4.842.547.336	94,52

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 58,52%, yang dihitung menggunakan metode rata-rata geometrik dari capaian indikator kinerja sasaran yang memiliki alokasi anggaran langsung. Sementara itu, tingkat penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar 94,52%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan tingkat penyerapan anggaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Capaian Kinerja Sasaran} / \text{Penyerapan Anggaran}) \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 61,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran masih belum optimal dan termasuk dalam kategori **Kurang Efisien**.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi tingkat efisiensi, yaitu:

- 1) Belum optimalnya capaian indikator pembangunan fasilitas transportasi
Capaian indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun hanya sebesar 33,33% dari target yang ditetapkan, meskipun tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi.
- 2) Kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas transportasi menghadapi kendala teknis, seperti kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses lokasi, serta faktor teknis lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan kegiatan berbasis kinerja
Perencanaan kegiatan belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi pencapaian target output.
- 4) Keterbatasan sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan
Keterbatasan sumber daya teknis dan operasional mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah dan akan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan
Menyusun perencanaan kegiatan secara lebih matang dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan kondisi lapangan.
- 2) Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
Memperkuat koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia
Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum mencapai target
Melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berada pada kategori kurang efisien dengan nilai efisiensi sebesar 61,90%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya capaian pada salah satu indikator sasaran, khususnya pembangunan fasilitas transportasi.

Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui perbaikan perencanaan, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara optimal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Namun demikian, terdapat program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kinerja, serta terdapat pula program yang belum sepenuhnya mendukung pencapaian target secara optimal. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program ini berkontribusi besar terhadap pencapaian sasaran *Terwujudnya kelancaran, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan*, dengan capaian indikator sebesar 102,70%.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain:

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (capaian 101,54%)
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (100%)
- 3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (97,96%)
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Kebijakan Lalu Lintas (100%)

Tingginya capaian kegiatan ini menunjukkan bahwa perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian operasional berjalan dengan baik sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini mendukung peningkatan kelancaran mobilitas antarwilayah. Beberapa sub kegiatan seperti:

- 1) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal (100%)
- 2) Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (100%)
- 3) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan (100%)

Meskipun secara sub kegiatan capaian tinggi, namun secara indikator sasaran jumlah fasilitas transportasi yang terbangun baru mencapai 33,33%, sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara capaian administrasi kegiatan dengan capaian output strategis.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mendukung indikator tata Kelola dengan kegiatan antara lain:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)
- 3) Administrasi Umum dan Kepegawaian (100%)
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang (89,12%)
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah (75%)

Program penunjang berkontribusi terhadap capaian Nilai SAKIP dan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, yang menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas perangkat daerah.

Program/Kegiatan yang Belum Optimal Mendukung Pencapaian Kinerja

Meskipun sebagian besar sub kegiatan menunjukkan capaian 100%, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian indikator strategis, yaitu:

1. Indikator Jumlah Fasilitas Transportasi yang Terbangun (33,33%)

Walaupun kegiatan pembangunan pelabuhan dan pengoperasian tercatat memiliki capaian 100% pada level sub kegiatan, secara indikator strategis jumlah fasilitas yang terbangun belum memenuhi target yang

ditetapkan dalam perencanaan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi fisik yang menjadi ukuran indikator belum sepenuhnya sesuai dengan target output strategis.

2. Program Penunjang dengan Capaian Tidak Maksimal

- 1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (89,12%)
- 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah (75%)

Capaian yang belum maksimal pada program penunjang ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dukungan administrasi dan operasional terhadap program teknis.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang atau tidak terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I.							
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100,00 % 95,46%	Menunjang
1)	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	91,70	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	100	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	
2)		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah an	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	100	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	
3)		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	
4)				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	100	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	
5)				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89,12	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	
6)				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	75	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	100	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Perizinannya (Unit)		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	
II.	Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	121,52				
1.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	102,70	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	94,24	Menunjang
1)				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	101,54	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	100	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	100	
2)				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	85	Menunjang
				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	100	
3)				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	97,96	Menunjang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	100	
				Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan	100	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)		
1.	Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah	Jumlah Fasilitas Transportasi yang terbangun	33,33	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	66,03	Menunjang
1)				Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan (Dokumen)	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Dokumen (DLKP) Pelabuhan Pengumpan lokal (Dokumen)	100	
2)				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	100	Menunjang
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	100	
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	100	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	100	
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	100	

Berdasarkan matriks di atas, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan program yang paling berkontribusi terhadap pencapaian pernyataan kinerja, khususnya dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, dengan capaian kegiatan yang sebagian besar mencapai atau melebihi target. Hal ini sejalan dengan capaian indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang mencapai 102,70%.

Program Pengelolaan Pelayaran juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan fasilitas dan kelancaran transportasi antarwilayah, meskipun capaian indikator strategis jumlah fasilitas transportasi yang terbangun belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan administratif dan operasional berjalan dengan baik, output strategis masih perlu ditingkatkan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memberikan kontribusi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan. Program ini mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP dan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara keseluruhan, sebagian besar program dan kegiatan telah menunjang pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas transportasi, agar pencapaian indikator strategis dapat lebih optimal pada tahun mendatang.

C. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 11.030.766.300, dengan realisasi sebesar Rp 10.529.693.923 atau sebesar 95,46%,

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 501.072.377 atau sebesar 4,54%. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Program Pengelolaan Pelayaran. Rincian alokasi dan realisasi anggaran per program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.907.188.400	5.687.146.588	96,27
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.200.586.000	1.174.575.849	97,83
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.922.991.900	3.667.971.487	93,50
Jumlah		11.030.766.300	10.529.693.923	95,46

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,83%, berhasil mendukung pencapaian indikator persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sebesar 102,70%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada program tersebut telah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Program Pengelolaan Pelayaran, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,50%, mendukung peningkatan operasional dan pelayanan transportasi laut. Namun demikian, capaian indikator jumlah fasilitas transportasi yang terbangun baru mencapai 33,33%, yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi, output yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan target

yang direncanakan. Hal ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada tahun berikutnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan tingkat realisasi sebesar 96,27%, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, yang tercermin dari capaian indikator Nilai SAKIP dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Program ini berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program teknis dan peningkatan akuntabilitas perangkat daerah.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah mendukung pencapaian sebagian besar indikator kinerja sasaran. Tingginya tingkat penyerapan anggaran yang diikuti dengan capaian indikator kinerja yang baik menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya pada program yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas transportasi, agar output yang dihasilkan dapat lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memperkuat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran sebesar 95,46% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara baik dan mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan

efisiensi, khususnya pada program yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas transportasi, dimana capaian output belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat penyerapan anggaran.

Analisis terhadap program dan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar program telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah, terutama Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tertentu yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan terus dilakukan sebagai bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah pada tahun mendatang.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun berikutnya pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat semakin meningkat dan seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah mampu mendukung pencapaian sebagian besar sasaran strategis perangkat daerah. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran sebesar 95,46% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan transportasi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal, khususnya indikator pembangunan fasilitas transportasi. Selain itu, hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat dinilai cukup baik, namun tetap memerlukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan guna mencapai seluruh sasaran strategis secara optimal.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan beberapa langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja, dengan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator sasaran strategis.

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas transportasi, melalui perencanaan teknis yang lebih matang dan pengendalian pelaksanaan yang lebih intensif.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat.
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
6. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala, guna memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Melalui upaya perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkatkan pencapaian kinerja secara lebih optimal, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat.